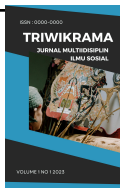
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANGKALAN

Lintang Laxita Chandra Dewi[1], Yusuf Hariyoko[2], Wahid Hidayat[3]

[123] Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

laxxx.38@gmail.com
yusufhari@untag-sby.ac.id
da474at@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi peserta didik serta mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh keterlibatan dan pola hubungan antar pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor dan pola hubungan antar stakeholder dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bangkalan menggunakan pendekatan *stakeholder analysis*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, SPPG Mlajah, SD Negeri Kraton 3 Bangkalan, SMP Negeri 3 Bangkalan, SMA Negeri 3 Bangkalan, DPRD Komisi IV Kabupaten Bangkalan, siswa penerima manfaat, dan wali murid. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi peran aktor, memetakan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*), serta mengkaji pola hubungan antar stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berperan sebagai koordinator kebijakan, SPPG sebagai pelaksana teknis distribusi makanan, sekolah sebagai penghubung operasional, DPRD sebagai pengawas kebijakan, serta siswa dan wali murid sebagai penerima manfaat. Pola hubungan antar stakeholder bersifat hierarkis, koordinatif, dan fungsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada koordinasi lintas aktor dan efektivitas komunikasi antar lembaga.

Kata Kunci: Stakeholder Analysis; Makan Bergizi Gratis; Pola Hubungan Stakeholder; Implementasi Kebijakan

A B S T R A C T

The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a strategic government policy aimed at improving students' nutritional status and supporting learning quality in schools. The success of this program is influenced not only by policy design, but also by the roles and interaction patterns among stakeholders involved in its implementation. This study aims to analyze the roles of actors and the patterns of relationships among stakeholders in the

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

implementation of the MBG Program in Bangkalan Regency using a stakeholder analysis approach. This study employs a qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants include the Bangkalan Regency Health Office, the Education Office, the Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mlajah, SDN Kraton 3 Bangkalan, SMPN 3 Bangkalan, SMAN 3 Bangkalan, Commission IV of the Bangkalan DPRD, beneficiary students, and parents. Data analysis was conducted by identifying stakeholders' roles, mapping levels of interest and power, and examining patterns of interaction among stakeholders. The results indicate that the Education and Health Offices serve as policy coordinators, SPPG acts as the technical implementer of meal production and distribution, schools function as operational intermediaries, the DPRD serves a supervisory role, while students and parents are the primary beneficiaries. Stakeholder relationships are characterized as hierarchical, coordinative, and functional. This study concludes that the success of the MBG Program depends on cross-sectoral coordination and effective communication among stakeholders.

Keywords: Stakeholder Analysis; Free Nutritious Meal Program; Stakeholder Relationships; Policy Implementation

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kualitas manusia yang unggul tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan kecukupan gizi sejak usia dini. Gizi yang baik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta daya tahan tubuh anak. Anak dengan status gizi yang optimal cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, tingkat kehadiran sekolah yang lebih tinggi, serta potensi produktivitas yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, investasi pada sektor gizi menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing bangsa.

Di Indonesia, permasalahan gizi masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Prevalensi stunting, gizi kurang, dan anemia masih ditemukan secara signifikan di berbagai daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai program intervensi gizi, hasil yang dicapai belum sepenuhnya merata. Ketimpangan antarwilayah menunjukkan bahwa belum semua daerah mampu melaksanakan kebijakan gizi secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, maupun kurangnya partisipasi masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi nasional dalam percepatan perbaikan gizi, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan siswa sekolah sebagai kelompok penerima manfaat utama. Program ini dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi harian anak sekaligus menjadi sarana edukasi tentang pola makan sehat. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, pemerintah berupaya menurunkan angka kekurangan gizi sekaligus mendorong pemerataan akses pangan sehat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program MBG juga diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor antara bidang kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Namun demikian, implementasi kebijakan publik yang kompleks seperti MBG tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan tidak berdiri sebagai produk administratif semata, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan tersebut berperan dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks kebijakan publik, pemangku kepentingan atau *stakeholders* didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan, pengaruh, dan kepedulian terhadap suatu kebijakan. Setiap stakeholder membawa agenda masing-masing yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan, baik dalam bentuk dukungan maupun resistensi. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan peran stakeholder, kebijakan berpotensi menghadapi hambatan dalam tahap implementasi meskipun telah dirancang dengan baik.

Stakeholder analysis menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji relasi antaraktor dalam kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi aktor kunci, memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh, serta memahami relasi kekuasaan dalam proses kebijakan. Stakeholder analysis tidak hanya membantu dalam mengungkap potensi konflik, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antarpihak. Dalam konteks Program MBG, pendekatan ini menjadi penting karena kebijakan melibatkan berbagai sektor, mulai dari institusi pemerintah, lembaga pendidikan, penyedia bahan pangan, hingga masyarakat.

Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah yang memungkinkan munculnya dinamika stakeholder yang kompleks. Sebagai daerah dengan kondisi geografis kepulauan dan sebagian wilayah pedesaan, Bangkalan dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang dapat memengaruhi efektivitas distribusi layanan publik, termasuk layanan pemenuhan gizi. Selain itu, variasi tingkat kesejahteraan masyarakat juga berpotensi memengaruhi daya dukung sosial terhadap kebijakan MBG.

Dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bangkalan, terdapat berbagai aktor yang terlibat langsung, seperti pemerintah daerah melalui dinas terkait, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, serta orang tua siswa. Di sisi lain, terdapat pula aktor tidak langsung seperti pelaku usaha pangan lokal, media, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda dalam pelaksanaan program. Ketimpangan dalam distribusi kewenangan dan informasi dapat memicu kesenjangan koordinasi antar aktor yang berdampak pada efektivitas kebijakan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa aspek tata kelola menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program gizi. Lemahnya koordinasi lintas sektor, kurangnya komunikasi antar lembaga, serta keterbatasan pemantauan di lapangan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis yang tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses dan aktor yang terlibat, menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi stakeholder dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan melalui pendekatan stakeholder analysis. Secara khusus, penelitian ini mengkaji peran masing-masing aktor, tingkat kepentingan dan pengaruh, serta pola hubungan yang terbangun antar stakeholder. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi aktor kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan, sekaligus mengungkap faktor penghambat dalam koordinasi lintas sektor.

Kontribusi akademik dari penelitian ini terletak pada penguatan sudut pandang governance dalam kebijakan gizi. Dengan menempatkan relasi antar aktor sebagai fokus analisis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola Program MBG agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan realitas empiris dalam implementasi Program MBG, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan serupa di daerah lain. Pendekatan stakeholder analysis memungkinkan kebijakan dipandang sebagai proses sosial yang dinamis, bukan semata-mata produk administratif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi antar pihak menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi.

TINJAUAN PUSTAKA

Governance

Governance merupakan konsep penting dalam kajian administrasi publik modern yang menekankan bahwa pengelolaan urusan publik tidak lagi sepenuhnya menjadi otoritas tunggal pemerintah, melainkan melibatkan aktor non-negara seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Governance berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokrasi konvensional. Kooiman dan Rhodes memandang governance sebagai pola interaksi antara berbagai aktor dalam mengelola kepentingan publik, sedangkan UNDP memaknai governance sebagai pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan publik di semua tingkat.
Dalam konteks kebijakan publik, governance menawarkan perspektif bahwa keberhasilan kebijakan bukan semata diukur dari pemenuhan target output, seperti jumlah layanan yang disalurkan, tetapi dari cara kebijakan tersebut dirancang, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip utama governance mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan melalui proses yang terbuka, melibatkan publik, memiliki pertanggungjawaban yang jelas, serta menjamin pemerataan manfaat.

Pendekatan governance menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan karena program ini tidak bersifat sektoral, melainkan melibatkan berbagai aktor lintas institusi. Pemerintah daerah memang berperan sebagai perancang dan pengelola kebijakan, namun keberhasilan program di lapangan sangat ditentukan oleh interaksi dengan sekolah, SPPG, orang tua siswa, serta lembaga pengawasan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



seperti DPRD. Oleh karena itu, MBG tidak dapat dipahami hanya sebagai program teknis pemberian makanan, tetapi sebagai bagian dari tata kelola kebijakan kesejahteraan yang kompleks dan multi-aktor

Selain itu, governance memungkinkan analisis kebijakan untuk menilai orientasi kebijakan secara normatif. Dalam penelitian ini, governance digunakan untuk menilai apakah MBG di Bangkalan benar-benar mencerminkan kebijakan berbasis kesejahteraan atau justru bermuatan politis. Dimensi struktural governance digunakan untuk melihat kekuatan dasar regulasi, dimensi proses untuk menilai keterlibatan publik, dan dimensi normatif untuk mengkaji orientasi manfaat kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa governance tidak hanya alat analisis teknis, tetapi juga kerangka evaluatif kebijakan publik.

2. Stakeholder Analysis

Stakeholder Analysis merupakan pendekatan analitis dalam kebijakan publik yang berfokus pada identifikasi aktor yang terlibat, kepentingan yang mereka miliki, serta tingkat pengaruh yang mereka jalankan dalam suatu kebijakan. Teori ini populer sejak diperkenalkan oleh Freeman, yang mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks kebijakan publik, stakeholder analysis berfungsi untuk memetakan aktor, memahami relasi kekuasaan, dan menilai pola interaksi antar pihak. Analisis ini menjadi penting ketika suatu kebijakan melibatkan banyak sektor dan institusi, seperti pada program MBG. Dengan stakeholder analysis, peneliti tidak hanya melihat kebijakan dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga menilai peran sekolah, siswa, orang tua, penyedia pangan, serta DPRD.

Stakeholder secara umum dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, key stakeholder, yaitu aktor dengan kewenangan dan pengaruh dominan terhadap kebijakan. Dalam penelitian ini yang termasuk kategori tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SPPG, satuan pendidikan, dan DPRD Komisi IV.

Kedua, primary stakeholder, yaitu pihak yang menerima dampak langsung dari kebijakan, dalam hal ini siswa dan sekolah sebagai penerima manfaat program MBG. Ketiga, secondary stakeholder, yaitu pihak pendukung seperti orang tua dan masyarakat sekitar sekolah.

Stakeholder Analysis juga menganalisis kepentingan yang dimiliki masing-masing aktor. Pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam keberhasilan program sebagai bentuk legitimasi kebijakan. Sekolah berkepentingan terhadap kesiapan sarana, mutu makanan, serta kepuasan siswa. Orang tua berkepentingan pada gizi anak, sedangkan DPRD berkepentingan terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Perbedaan kepentingan ini dapat memunculkan potensi konflik sekaligus peluang kolaborasi.

Selain itu, stakeholder analysis menekankan pentingnya relasi antaraktor. Hubungan antar-stakeholder membentuk pola network governance, yaitu jejaring kebijakan di mana tidak ada aktor yang mampu bekerja sendiri. Dalam kebijakan MBG Bangkalan, pemerintah berperan sebagai koordinator, sekolah sebagai pelaksana, SPPG sebagai penyedia layanan, dan DPRD

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



sebagai pengawas eksternal. Pola ini menunjukkan bahwa MBG merupakan kebijakan berbasis jejaring, bukan kebijakan top-down semata

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran, kepentingan, pengaruh, serta pola hubungan antar stakeholder dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. Penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan menggambarkan fenomena kebijakan sebagaimana terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada konfigurasi aktor, relasi antar lembaga, serta dinamika implementasi program dari perspektif para pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis pada tahap awal. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan distribusi pangan yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan di beberapa satuan pendidikan dan unit pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari pelaksana program MBG.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pejabat daerah yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala sekolah, serta guru yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, orang tua siswa penerima manfaat juga dijadikan informan untuk memperoleh informasi terkait dampak kebijakan terhadap peserta didik. Informan pendukung terdiri atas pelaku usaha pangan lokal dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi secara tidak langsung dalam implementasi program. Kriteria pemilihan informan mencakup keterlibatan langsung, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta pengetahuan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi penyusunan pedoman wawancara, penentuan informan, serta pengurusan perizinan penelitian kepada instansi terkait. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara simultan selama dan setelah proses pengumpulan data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah diverifikasi.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator stakeholder analysis, yaitu tingkat kepentingan, pengaruh, dan keterlibatan masing-masing aktor. Lembar observasi digunakan untuk mencatat proses implementasi program di lapangan, termasuk mekanisme distribusi makanan, koordinasi antar pihak, serta kepatuhan terhadap standar operasional. Pedoman dokumentasi berfungsi untuk mencatat data dari regulasi, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, serta mengodekan data sesuai tema penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif, tabel pemetaan stakeholder, dan matriks kepentingan-pengaruh (*power-interest matrix*). Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan hubungan antar stakeholder yang ditemukan di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada informan (*member check*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan melibatkan sejumlah aktor kunci yang bekerja dalam struktur kebijakan yang bersifat lintas sektor. Berdasarkan pendekatan *stakeholder analysis*, aktor-aktor dalam kebijakan MBG diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu key stakeholder, primary stakeholder, dan secondary stakeholder. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengaruh terhadap kebijakan, serta kedudukan dalam proses pelaksanaan di lapangan.

Klasifikasi aktor ini menegaskan bahwa MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknis penyediaan makanan, melainkan sebagai kebijakan publik yang mengandalkan kerja sama institusional lintas sektor dalam kerangka governance. Setiap aktor memiliki kepentingan, sumber daya, serta pengaruh yang berbeda, namun saling terhubung dalam satu sistem implementasi kebijakan.

Struktur kebijakan MBG di Bangkalan menunjukkan bahwa aktor pemerintah mendominasi keputusan strategis, sementara aktor non-pemerintah berperan dalam mendukung keberlanjutan dan legitimasi kebijakan. Konfigurasi ini mencerminkan karakteristik *state-centered governance*, di mana negara tetap menjadi sutradara kebijakan, tetapi membutuhkan dukungan aktor lain dalam pelaksanaannya.

Key Stakeholder

Key stakeholder adalah aktor yang memiliki kewenangan formal serta kapasitas pengaruh tertinggi dalam kebijakan MBG. Dalam konteks Kabupaten Bangkalan, aktor kunci terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SPPG, dan DPRD Komisi IV.

a. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan berperan sebagai koordinator kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan sasaran menerima layanan MBG sesuai ketentuan. Peran utama meliputi pendataan sekolah, penjadwalan distribusi, koordinasi administratif, serta pelaporan pelaksanaan program kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Dinas Pendidikan lebih dominan pada aspek teknis administratif dibandingkan fungsi pengawasan kualitas layanan. Koordinasi dilakukan melalui surat edaran, laporan berkala dari sekolah, dan komunikasi informal. Kondisi ini

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi belum sepenuhnya berbasis pada sistem informasi terpadu.

Dalam perspektif governance, peran Dinas Pendidikan mencerminkan fungsi *steering*, yaitu mengarahkan kebijakan melalui regulasi dan koordinasi, tanpa terlibat langsung dalam operasional lapangan. Namun lemahnya prosedur standar lintas sekolah menunjukkan perlunya penguatan tata kelola berbasis standar operasional yang seragam.

b. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap aspek kesehatan dan keamanan pangan dalam MBG. Kewenangan ini mencakup inspeksi dapur SPPG, pemantauan kualitas menu, serta pengawasan dampak kesehatan siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kesehatan belum merata karena keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua dapur dapat diawasi secara berkala. Dalam kerangka *stakeholder analysis*, Dinas Kesehatan memiliki kepentingan tinggi terhadap kualitas layanan, tetapi keterbatasan kapasitas menjadi hambatan efektivitas.

Secara teoritis, peran Dinas Kesehatan adalah menjaga kepatuhan kebijakan terhadap standar kesehatan publik. Lemahnya intensitas pengawasan berpotensi memunculkan *governance gap* antara regulasi dan implementasi.

c. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

SPPG merupakan pelaksana teknis utama. Peran SPPG meliputi perencanaan menu, pengadaan bahan, pengolahan makanan, serta distribusi ke sekolah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas SPPG sangat menentukan mutu layanan. Ketika fasilitas atau jumlah tenaga kerja terbatas, keterlambatan distribusi dan standar kebersihan menjadi persoalan utama. Dalam *power-interest matrix*, SPPG berada pada posisi paling strategis karena memiliki pengaruh langsung terhadap hasil kebijakan. Meskipun demikian, belum semua SPPG memiliki prosedur operasional yang distandarisasi sehingga kualitas layanan bersifat fluktuatif.

Tabel 4.2 Data jumlah SPPG di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

Kecamatan	Jumlah SPPG	Daftar SPPG
Modung	**5**	1) Ponpes Al Anwar (Modung) 2) Modung Patereman – Yayasan Berkah Nusantara Peduli 3) Modung Patereman 2 – Yayasan Ash Shafiyah 4) Modung Pangpajung – Yayasan Discovery Water Sustainability 5) Al Anwar 2 Patereman

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

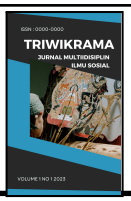


Kecamatan	Jumlah SPPG	Daftar SPPG
Tanjung Bumi	**4**	1) Bumi Anyar – Al Munir Jaya Barokah 2) Bumi Anyar 2 – Sehat Luhur Mandiri 3) Banyusangkah – Al Munir Jaya Barokah 4) Bumi Anyar Kwanyar – Al Munir Jaya Barokah
Geger	**1**	1) Kombangan – Al Munir Jaya Barokah
Bangkalan Kota	**2**	1) Martajasah – Sehat Luhur Mandiri 2) Mlajah – Sehat Luhur Mandiri
Kokop	**3**	1) Tlokoh – Garda Rejowangi Bela Bangsa 2) Durjan – Yayasan Al Mu'in Birem 3) Katol Timur – Fela Mandiri Raya
Klampis	**1**	1) Kompol – Yayasan Al Ghozali Dua Penyantren
Konang	**2**	1) Cangkareman – Yayasan Ibnu Dahlan 2) Batokaban 2 – Fela Mandiri Raya
Labang	**1**	1) Pangpong – Garuda Jaya Abadi
Kamal	**2**	1) Gili Timur – Yayasan Laili Izzatul Faiqoh 2) Banyuajuh 3 – Garuda Jaya Abadi
Burneh	**1**	1) Burneh – Yayasan Laili Izzatul Faiqoh
Sepulu	**1**	1) Lembung Paseser – YPI Al Azhar Indonesia
Kwanyar	**2**	1) Janteh 2 – Yayasan Laili Izzatul Faiqoh 2) Pesanggrahan – Yayasan Langkah Bersama Kita

Sumber : Data internal SPPG dalam Pembagian Unit SPPG Bangkalan

d. DPRD Komisi IV Kabupaten Bangkalan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



DPRD menjalankan fungsi kontrol politik dan anggaran. Aktivitas utama meliputi pengawasan penggunaan anggaran MBG serta penilaian efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lebih menekankan pada aspek realisasi anggaran dibandingkan hasil kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi pengawasan perlu diarahkan menuju evaluasi berbasis dampak (*outcome-based governance*).

Primary Stakeholder: Siswa Penerima MBG

Siswa merupakan aktor yang menerima dampak langsung kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyambut positif MBG karena membantu pemenuhan kebutuhan gizi. Namun temuan lapangan juga menunjukkan adanya keluhan terkait variasi menu dan keterlambatan distribusi di beberapa sekolah. Dalam teori stakeholder analysis, siswa termasuk aktor dengan kepentingan tinggi, tetapi daya pengaruh rendah. Aspirasi siswa belum terakomodasi secara formal dalam proses evaluasi. Tidak adanya mekanisme survei kepuasan atau forum umpan balik menyebabkan suara siswa hanya tersampaikan melalui guru atau kepala sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa governance MBG masih bersifat *top-down*, dengan partisipasi pengguna relatif terbatas.

Secondary Stakeholder

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan sebagai mediator pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Ia mengatur distribusi, mengkoordinasikan guru, serta berkomunikasi dengan SPPG dan dinas. Kepala sekolah memiliki kepentingan tinggi tetapi kewenangan terbatas. Dalam praktiknya, kepala sekolah sering menjadi pihak pertama yang menerima keluhan. Namun, keterlibatan kepala sekolah dalam perencanaan program masih sangat minim. Dari perspektif governance, kepala sekolah seharusnya diposisikan sebagai *co-governor*, bukan sekadar pelaksana.

b. Orang Tua Siswa

Orang tua merupakan kontrol sosial informal. Dukungan orang tua sangat memengaruhi keberlanjutan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan minimnya forum komunikasi resmi antara pemerintah dan orang tua. Keluhan disampaikan melalui mediainformal. Ini menunjukkan belum optimalnya prinsip partisipasi dan transparansi dalam governance.

Pola Hubungan dan Koordinasi Stakeholder

Hubungan antar aktor dalam MBG menunjukkan karakter network governance yang belum matang. Koordinasi terjadi secara vertikal antara pemerintah daerah–SPPG–sekolah dan horizontal antara sekolah–SPPG.

Namun mekanisme formal koordinasi lintas aktor masih lemah. Tidak ada forum rutin atau sistem aduan terstruktur. Koordinasi masih bergantung pada komunikasi informal. Dalam teori governance, lemahnya platform koordinasi berdampak pada fragmentasi kebijakan. Penguatan mekanisme komunikasi formal menjadi syarat mutlak perbaikan tata kelola.

PEMBAHASAN

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan satu dari sekian kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar. MBG hadir sebagai intervensi langsung pemerintah terhadap ketidakmerataan gizi, tingginya angka stunting, serta ketimpangan akses pangan terutama di daerah rentan seperti Kabupaten Bangkalan. Sebagai wilayah dengan karakter sosial ekonomi yang beragam—terdiri atas wilayah kecamatan perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir—Bangkalan memiliki struktur kebutuhan yang berbeda dalam implementasi kebijakan.

Secara teknis, implementasi program MBG di Bangkalan tertuang melalui mekanisme pelibatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan kepada sekolah-sekolah sasaran. Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengintegrasikan program ini dalam sistem pelayanan publik berbasis kolaborasi lintas sektor, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta dukungan legislatif dari DPRD Komisi IV. Dengan demikian, pola implementasi MBG di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika koordinasi antarinstansi pemerintah, kesiapan infrastruktur penyedia makanan, serta kemampuan sekolah menerima dan menyalurkan makanan kepada peserta didik.

Program MBG ditujukan untuk mengatasi kesenjangan konsumsi gizi pada peserta didik yang secara konsisten menjadi faktor penghambat proses belajar. Dengan adanya pemberian makanan bergizi secara rutin, pemerintah berupaya meningkatkan status gizi anak, konsentrasi belajar, serta menghadirkan lingkungan sekolah yang lebih mendukung perkembangan kognitif.
Dalam konteks Bangkalan, implementasi MBG menghadapi sejumlah karakteristik unik. Pertama, wilayah Bangkalan memiliki disparitas geografis antara daerah yang mudah dijangkau dan daerah dengan akses terbatas. Kedua, kultur konsumsi masyarakat lokal serta preferensi bahan pangan turut mempengaruhi formulasi menu makanan yang harus adaptif secara budaya. Ketiga, MBG menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang menuntut tata kelola integratif, sehingga konflik kewenangan dan hambatan koordinasi dapat muncul apabila tidak diselaraskan.
Dengan demikian, gambaran umum implementasi MBG di Bangkalan memperlihatkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar distribusi makanan, tetapi merupakan intervensi struktural yang melibatkan berbagai aktor dan sistem, mulai dari perencanaan, penyediaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.

Identifikasi Aktor dalam Implementasi MBG

Stakeholder Analysis menjadi pendekatan yang tepat untuk melihat dinamika kebijakan MBG karena kebijakan ini melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Identifikasi aktor bertujuan untuk memetakan pihak-pihak mana yang memiliki peran strategis, apa kepentingan mereka, serta bagaimana posisi mereka dalam memengaruhi arah kebijakan.

Aktor Kunci (Key Stakeholders)

Aktor kunci adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi terhadap implementasi kebijakan. Dalam implementasi MBG di Bangkalan, aktor kunci meliputi:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas manajemen sekolah, Dinas Pendidikan menjadi koordinator utama implementasi MBG di daerah. Peran mereka mencakup penentuan sekolah penerima, pembinaan teknis, pengawasan distribusi makanan, serta penyusunan laporan kepada pemerintah pusat. Dinas Pendidikan juga berfungsi sebagai penjembatan antara sekolah dan SPPG.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Dinas Kesehatan berperan dalam penyusunan standar gizi, pengawasan keamanan pangan, dan pemantauan status gizi siswa. Selain itu, puskesmas di masing-masing kecamatan sering dilibatkan dalam pemeriksaan sampel makanan dan pendampingan kesehatan peserta didik.

3. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

SPPG merupakan operator teknis yang bertanggung jawab memproduksi dan memastikan distribusi makanan tepat waktu. SPPG Mlajah salah satu unit yang bertugas menyediakan makanan ke sekolah-sekolah sasaran melalui mekanisme distribusi harian.

4. DPRD Komisi IV

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Komisi IV berperan mengawasi pelaksanaan program, menyetujui dan mengawal pendanaan, serta memastikan regulasi daerah selaras dengan kebutuhan lapangan.

Aktor Utama (Primary Stakeholders)

Aktor utama adalah pihak yang secara langsung menerima dampak kebijakan.

1. Sekolah penerima program

Dalam penelitian ini, tiga sekolah menjadi objek utama:

- SDN Kraton 3
- SMP Negeri 3 Bangkalan
- SMAN 3 Bangkalan

Sekolah bertanggung jawab mengawasi pembagian makanan, mencatat jumlah penerima, dan melaporkan setiap kendala teknis.

2. Siswa sebagai penerima manfaat

Peserta didik merupakan target kebijakan. Konsumsi rutin makanan bergizi diharapkan meningkatkan kesehatan, konsentrasi, serta motivasi belajar.

3. Orang tua siswa

Orang tua memiliki peran tidak langsung, yaitu sebagai pengamat eksternal yang menilai kualitas program dan memberikan tanggapan yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan.

Aktor Pendukung (Secondary Stakeholders)

Aktor pendukung adalah pihak yang memiliki kontribusi tidak langsung namun tetap penting:

- Media lokal yang berfungsi mengawasi dan memberi informasi kepada publik.
- Organisasi masyarakat yang mendukung penyuluhan gizi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



- Aparat kecamatan atau desa yang membantu distribusi ketika terjadi kendala medan.

Analisis Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Analisis ini melihat dua variabel: **power** (pengaruh) dan **interest** (kepentingan). Pengaruh menggambarkan sejauh mana aktor dapat menentukan atau mengubah jalannya kebijakan. Kepentingan menunjukkan seberapa besar aktor terlibat dan terdampak oleh kebijakan.

Aktor Berkepentingan Tinggi dan Berpengaruh Besar (High Power – High Interest)

Kelompok ini mencakup:

- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- SPPG
- DPRD Komisi IV

Keempatnya memengaruhi arah kebijakan, kemampuan distribusi, validitas standar gizi, hingga keberlanjutan program. Mereka adalah *key drivers* yang menentukan efektivitas implementasi MBG.

Aktor Berkepentingan Tinggi namun Berpengaruh Rendah (High Interest – Low Power)

Kelompok ini meliputi:

- Sekolah
- Guru

  Orang tua

Mereka paling terdampak oleh keberhasilan atau kegagalan implementasi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah sistem kebijakan.

Aktor Berpengaruh Besar namun Berkepentingan Rendah (High Power – Low Interest)

Media lokal dan tokoh masyarakat dapat membentuk opini publik ketika terjadi kasus tertentu, seperti isu kualitas makanan atau distribusi terlambat. Pengaruh mereka besar, namun kepentingan mereka tidak langsung.

Aktor Berkepentingan dan Berpengaruh Rendah (Low Power – Low Interest)

Kelompok ini terdiri dari unit atau lembaga lain yang tidak terlibat langsung, tetapi dapat mendukung apabila dibutuhkan, seperti organisasi nirlaba atau akademisi.

Pola Hubungan dan Koordinasi Antar Stakeholder

Koordinasi menjadi aspek krusial dalam implementasi MBG. Pola hubungan antaraktor dapat dipahami melalui tiga mekanisme berikut:

A. Koordinasi Vertikal

Terjadi antara pemerintah pusat – pemerintah daerah – sekolah.

- Kebijakan pusat mengatur juknis dan standar pelaksanaan.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



- Pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan sesuai kapasitas lokal.
- Sekolah menjalankan teknis distribusi langsung.

Pola vertikal ini bersifat hirarkis dan menuntut kepatuhan administratif.

B. Koordinasi Horizontal

Koordinasi di tingkat daerah antara:

- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- SPPG
- DPRD
- Puskesmas

Tantangan koordinasi sering terjadi pada:

- Sinkronisasi menu pangan
- Pengawasan kualitas makanan
- Mekanisme evaluasi
- Pelaporan harian dan mingguan

Keberhasilan MBG sangat dipengaruhi kelancaran koordinasi horizontal ini.

C. Koordinasi Diagonal

Ini melibatkan hubungan lintas sektor non-pemerintah seperti orang tua, komite sekolah, dan media.

Koordinasi diagonal biasanya berperan dalam:

- Penyampaian informasi kepada masyarakat
- Manajemen keluhan
- Penilaian kualitas layanan

Ketika ketiga jenis koordinasi berjalan simultan, implementasi MBG menjadi stabil dan lebih efektif.

Beberapa tantangan utama yang muncul berdasarkan data lapangan dan literatur pendukung meliputi:

1. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi

Bangkalan memiliki beberapa wilayah yang jaraknya jauh dari pusat produksi SPPG. Keterlambatan distribusi makanan dapat terjadi karena:

- Jalan desa yang tidak memadai
- Kendaraan distribusi terbatas
- Cuaca ekstrem

2. Ketersediaan Bahan Pangan Lokal

Sebagai daerah pesisir, ketersediaan bahan bergizi seperti sayuran dan protein hewani tidak selalu stabil. Ketergantungan pada pemasok tertentu membuat produksi makanan rentan.

3. Pengawasan Kualitas Makanan

Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa standar gizi terpenuhi. Namun beban pengawasan besar karena jumlah sekolah penerima banyak dan tersebar.

4. Pemahaman Sekolah Terhadap SOP

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tidak semua sekolah memahami mekanisme pelaporan distribusi dan pelaksanaan pengawasan internal. Hal ini menimbulkan perbedaan kualitas implementasi antar sekolah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Stakeholder Analysis dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan merupakan kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor dengan peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Kebijakan ini tidak dapat dijalankan oleh satu aktor saja, melainkan bergantung pada keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, sekolah, lembaga pelaksana teknis, hingga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG bersifat lintas sektor dan memerlukan pola tata kelola yang kolaboratif.

Kedua, hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori aktor utama dalam implementasi kebijakan MBG, yaitu *key stakeholder*, *primary stakeholder*, dan *secondary stakeholder*.

a. Aktor kunci (*key stakeholder*) meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SPPG, satuan pendidikan, serta DPRD Komisi IV yang memiliki kewenangan dan pengaruh besar dalam perumusan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program.

b. Aktor utama (*primary stakeholder*) adalah sekolah dan siswa sebagai penerima manfaat langsung. Siswa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai aktor evaluatif melalui tingkat konsumsi, preferensi menu, serta respons terhadap mutu makanan.

c. Aktor pendukung (*secondary stakeholder*) meliputi orang tua dan masyarakat sekitar sekolah yang berperan dalam mendukung keberlangsungan program melalui legitimasi sosial dan kontrol tidak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, pola hubungan antar stakeholder dalam kebijakan MBG di Kabupaten Bangkalan membentuk model *network governance*, yaitu pola tata kelola yang menekankan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antar lembaga. Meskipun koordinasi antar aktor telah berjalan, penelitian menemukan bahwa mekanisme kerja sama tersebut belum sepenuhnya sistematis dan terlembaga. Beberapa kendala yang ditemui di lapangan meliputi keterbatasan sumber daya di sekolah, keterlambatan arus informasi, perbedaan persepsi masyarakat terhadap kualitas makanan, serta belum adanya forum komunikasi rutin antar sekolah penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga agar berjalan lebih efektif.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Keempat, dari sisi orientasi kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan secara substansi menunjukkan tujuan kesejahteraan, khususnya dalam meningkatkan status gizi peserta didik dan mendukung proses belajar di sekolah. Program ini dinilai relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangkalan yang sebagian masih berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, kebijakan ini juga mengandung dimensi politik, terutama dalam aspek pencitraan dan legitimasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan MBG dapat dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan yang dijalankan dalam konteks politik.

Kelima, secara akademik penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *stakeholder analysis* sangat relevan digunakan untuk mengkaji kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh dinamika hubungan antar aktor, distribusi kekuasaan, dan pola koordinasi yang terbentuk dalam proses implementasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan sangat ditentukan oleh efektivitas peran stakeholder kunci, sinergi antar lembaga, serta tingkat penerimaan siswa sebagai kelompok sasaran utama kebijakan. Tanpa penguatan koordinasi dan tata kelola yang baik, kebijakan yang secara normatif baik tidak akan mencapai hasil yang optimal di lapangan.

Saran

Berdasarkan hasil penulisan data yang diperoleh oleh peneliti pada pembahasan dan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi telah disusun oleh peneliti untuk menjadi bahan perbandingan pada proses evaluasi kebijakan, terutama terkait stakeholder atau aktor yang terlibat pada Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan. Rekomendais yang disusun sebagai berikut :

1. Penguatan Koordinasi Antar Stakeholder
   Pemerintah Kabupaten Bangkalan disarankan membentuk forum koordinasi tetap antar pemangku kepentingan yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SPPG, kepala sekolah, dan perwakilan DPRD. Forum ini berfungsi sebagai wadah sinkronisasi informasi, klarifikasi teknis pelaksanaan, serta evaluasi rutin program MBG agar permasalahan implementasi dapat ditangani secara cepat dan terpadu.

2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Pengawasan Mutu Program
   SPPG bersama Dinas Kesehatan perlu memperkuat standar operasional prosedur (SOP) terkait pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan. Pengawasan mutu dapat dilakukan melalui inspeksi berkala, pelatihan higiene bagi petugas dapur, serta pemantauan kesesuaian menu dengan standar gizi. Hal ini bertujuan untuk memastikan



makanan yang disajikan aman, bergizi, dan layak konsumsi.

3. Pemberdayaan Sekolah dan Siswa dalam Evaluasi Program
   Sekolah disarankan membangun mekanisme evaluasi sederhana melalui penyediaan kotak saran, survei kepuasan siswa, atau pelibatan OSIS dalam penilaian menu dan distribusi makanan. Pelibatan siswa sebagai aktor evaluatif diharapkan dapat meningkatkan ketepatan kebijakan sekaligus meningkatkan tingkat penerimaan program di kalangan peserta didik.

Dengan menerapkan rekoemndasi secarakonsisten dan menyeluruh, diharapkan bahwa aktor / stakeholder dari kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan dapat menjadi lebih efektif dan menciptakan ruang luas untuk pertumbuhan anak bangsa dengan gizi yang seimbang dan kualitas sumber daya emas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2024, Januari 23). *SPPG di Bangkalan mulai beroperasi, siapkan MBG unttuk 3.999 orang*. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5047333/sppg-di-bangkalan-mulai-beroperasi-siapkan-mbg-untuk-3999-orang

Bappenas. (2020). *Transformasi pembangunan manusia: Kebijakan gizi, kesehatan, dan pendidikan dalam RPJMN 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Bryson, J. M. (2004). *What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques*. *Public Management Review, 6*(1), 21–53. https://doi.org/10.1080/14719030410001675722

Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Presiden Republik Indonesia. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, *90*(5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170. Jakarta: Sekretariat Negara.

Subarsono, A. G. (2015). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar. UNICEF Indonesia. (2022). *Situation analysis of children in Indonesia: Addressing nutrition and stunting*. Jakarta: UNICEF.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.